



Imam-Fadli Gugat Hasil Pilwali ke MK

YOGYAKARTA – Hari ketiga atau proses terakhir rekapitulasi suara Pilwali Kota Yogyakarta 2017 kemarin berlangsung sengit. Saksi kubu pasangan calon nomor urut 1 Imam Priyono-Achmad Fadli, Fokki Ardiyanto dan Danang Rudyatmoko, memilih *walk out* (keluar) di ujung proses rekapitulasi di Kantor KPU Kota Yogyakarta, Jalan Magelang, Tegalrejo.

HASIL REKAPITULASI SUARA PILWALI YOGYAKARTA 2017, HARYADI-HEROE DINYATAKAN UNGGUL

Alasan *walk out* karena permintaan membuka seluruh kotak suara tidak sah dari 14 kecamatan tak digubris Komisiner Komisi Pemilihan Umum (KPU). Mereka pun bersiap menggugat hasil pencoblosan pada 15 Februari lalu.

(dari Hal 1)

"Sejak hari pertama proses rekapitulasi, kami konsisten seluruh kotak suara tidak sah agar dibuka. Ini bukan soal menang atau kalah, tapi soal hak konstitusional dan kedaulatan rakyat," kata Fokki se usai *walk out*.

Pihaknya mengklaim ada kesalahan prosedur selama proses penyelenggaraan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali (Pilwali) Kota Yogyakarta 2017. Dimulai dari penetapan daftar pemilih tetap (DPT), penyerahan form C6 (undangan memilih), proses pemungutan suara, dan rekapitulasi di tingkat tempat pemungutan suara (TPS), kecamatan, hingga kota.

"Dugaan kami selama ini sedikit terbukti selama proses rekapitulasi di KPU. Tiga surat suara sah dinyatakan tidak sah oleh KPSPS, setelah ada pembukaan ulang surat suara di KPU, tiga surat itu dinyatakan sah," katanya.

Menurut dia, hal itu membuktikan ada *human error* (kesalahan manusia) yang dilakukan penyelenggara Pilwali Yogyakarta 2017 dalam menentukan surat suara tidak sah. Alasan itu yang mendasari pihaknya selama tiga hari proses rekapitulasi selalu mengajukan keberatan dan tuntutan membuka kotak suara tidak sah. Namun, selama tiga hari itu, tuntutananya tak dipenuhi KPU.

"Meski ada pembukaan surat suara tidak sah dari beberapa TPS di dua kecamatan, tapi itu ada yang hanya *sampling*. Kami tidak menyepakati dibuka *sampling*, itu hanya rekomendasi panwas (panitia pengawas)," ujarnya.

Karena memutuskan *walk out*, pihaknya juga memastikan tidak akan menandatangani berita acara hasil rekapitulasi suara Pilwali Yogyakarta 2017. Tak hanya diwarnai aksi *walk out*, dalam rapat pleno reka-

Tindak Lanjut

- Untuk Ditanggapi
- Untuk Diketahui
- Jumpa Pers

Instansi

1. KPU Kota YK
2. Panwas Kota YK
3.
4.
5.

✓ Netral
✓ Biasa

Pt. Kota

pitulasi saksi kubu paslon nomor urut 2 Haryadi-Suyuti-Heroe Poerwadi juga melakukan protes keras, yakni soal kebijakan KPU dan panwas membuka kotak suara tidak sah dari 11 TPS berasal dari Kelurahan Muja Muju, Kecamatan Umbulharjo.

Sebelas kotak suara yang dibuka berasal dari TPS 12 hingga TPS22 Muja Muju. Panwas merekomendasikan membuka surat suara secara *sampling*, yaitu tiap TPS hanya diambil dua kotak surat suara saja.

Saksi kubu Haryadi-Heroe, Nurcahyo Nugroho mengatakan, sesuai Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) No 11/2015, ketika tidak ada perselisihan jumlah suara, maka tidak perlu pembukaan surat suara ulang. Karena itu, dia mempertanyakan pembukaan surat suara secara *sampling* yang dilakukan KPU atas dasar rekomendasi panwas.

"Tak ada alasan apa pun yang memperkuat dibukanya kotak suara karena tak ada selisih dan keberatan di tingkat TPS. Pembukaan kotak suara dari TPS di Kotabaru Gondokusuman dan terakhir hari ini 11 kotak dari Muja Muju Umbulharjo, kami keberatan karena tak ada dasar hukumnya sama sekali. Rekomendasi panwas tak ada dasar hukumnya, seharusnya KPU tegas menolak rekomendasi panwas membuka kotak suara," kata Nurcahyo kesal.

Ketua KPU Yogyakarta Wawan Budiyo menegaskan, pembukaan kotak suara memang harus memiliki dasar jelas, yakni jika ada perselisihan jumlah suara tingkat TPS dan PPK atau ada keberatan dari saksi paslon. Terkait pembukaan surat suara tidak sah secara *sampling*, pihaknya hanya menindaklanjuti rekomendasi panwas.

"Karena panwas merekomendasikan untuk membuka surat

suara tidak sah, maka kami laksanakan. Kami membuka dan menunjukkan kepada saksi kedua paslon dan panwas. Satu surat suara yang ditemukan sah dari TPS 14 Muja Muju juga disepakati oleh panwas menjadi surat suara sah untuk paslon 1," ujarnya.

Sementara Ketua Panwas Yogyakarta Agus Muhammad Yasin mengatakan, pihaknya merekomendasikan pembukaan surat suara tidak sah dari TPS 04 Kotabaru dan 11 TPS di Muja Muju atas rekomendasi dari panwas. "Menindaklanjuti persoalan dari tingkat kecamatan yang belum selesai sehingga dibawa sampai tingkat kota," tuturnya.

Pihaknya memang merekomendasikan tiga surat suara tidak sah dari TPS Kotabaru dan Muja Muju menjadi suara sah. Dirinya juga meminta KPU memperbaiki data perolehan suara paslon. Agus juga menegaskan, panwas bekerja independen, transparan, dan mengeluarkan rekomendasi sesuai aturan perundangan.

Perolehan Suara Haryadi-Heroe Unggul

Di sisi lain, hasil rapat pleno terbuka rekapitulasi suara Pilwali Yogyakarta 2017, perolehan suara paslon Haryadi-Heroe mengungguli Imam-Fadli. Ditemukan surat suara sah dalam kotak suara tidak sah tak begitu berdampak signifikan terhadap perolehan suara kedua paslon. Dari rekapitulasi suara 14 kecamatan, Haryadi-Heroe memperoleh 100.333 suara. Sedangkan Imam-Fadli hanya 99.146 suara. Untuk jumlah suara tidak sah 14.355 suara.

Suara tersebut berasal dari pengguna hak pilih dari DPT, daftar pemilih pindahan (DPPH), dan daftar pemilih tambahan (DPTB) yang memakai e-KTP/surat keterangan 213.834 orang, serta 340 orang penyandang disabilitas. Total

jumlah pemilih yang masuk dalam DPT, DPPH, dan DPTB ada 302.014 orang ditambah pemilih dari disabilitas 837 orang.

Wawan Budiyo mengatakan pihaknya resmi belum menetapkan paslon terpilih. Sebab proses rekapitulasi di KPU hanya menghitung hasil rekapitulasi tingkat sebelumnya, yakni tingkat kecamatan. "Untuk penetapan resmi baru akan dilakukan Maret mendatang. Tahapan sekarang baru proses rekapitulasi suara dari 14 kecamatan," ucapnya.

Seandainya ada perselisihan terhadap rekapitulasi suara tingkat KPU yang berujung gugatan hukum ke Mahkamah Konstitusi (MK), penetapan paslon terpilih harus menunggu putusan resmi MK. "Nanti kita lihat keputusan MK apa saja," katanya.

KPU pun menghormati jika nanti ada pihak yang mengajukan gugatan ke MK. Hanya dia berharap gugatan disertai bukti akurat. Terkait aksi *walk out* saksi paslon nomor urut 1 sehingga tidak ikut menandatangani berita acara hasil rekapitulasi, Wawan menegaskan, ini tidak berpengaruh dan proses rekapitulasi masih bisa dilanjutkan. Termasuk nanti saat penetapan paslon terpilih.

Kubu Imam-Fadli Gugat ke MK

Ketua Tim Pemenangan Imam-Fadli, Danang Rudyatmoko, memastikan pihaknya akan mengajukan gugatan ke MK. "Tak hanya MK, kemungkinan kita juga akan melapor ke DKPP (Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu) atas kesalahan prosedur panwas dan KPU," kata Danang.

Dia mengklaim, pihaknya telah mengantongi sejumlah bukti kuat sebagai dasar gugatan. Di antaranya dari penetapan DPT, penyerahan *form C6*, proses pemungutan suara, dan rekapitulasi di tingkat TPS,

kecamatan, hingga kota.

"Ada warga yang memiliki hak pilih, tapi tak masuk DPT. Ada warga yang sudah meninggal dunia, justru masuk DPT. Selain itu, juga kesalahan prosedur selama proses pemungutan suara yang berakibat banyak surat suara tidak sah dan rusak," kata Danang.

Terhitung mulai kemarin pihaknya memiliki waktu maksimal tiga hari mendaftarkan gugatan ke MK. "Tim hukum kami sudah siapkan seluruh dokumen dan alat bukti. Kami akan ajukan gugatan ke MK. Nanti didampingi tim hukum dari DPP PDIP," kata Danang yang juga menjabat Ketua DPC PDIP Kota Yogyakarta ini.

Saksi paslon Haryadi-Heroe juga menyatakan, akan melaporkan KPU dan panwas ke DKPP terkait proses pembukaan kotak suara tanpa alasan jelas sesuai aturan perundangan.

Pendukung Ricuh

Di luar Kantor KPU Kota Yogyakarta, lokasi tempat rekapitulasi suara, kemarin siang, puluhan pendukung paslon Imam-Fadli melakukan aksi menuntut profesionalisme dan transparansi KPU. Massa menuntut dibukanya surat suara untuk memastikan suara sah maupun tidak sah.

Aksi yang berlangsung damai tiba-tiba ricuh. Massa sempat saling dorong dan adu lempar botol air mineral dengan aparat kepolisian. Ratusan personel dari Polresta Yogyakarta dan Brimob Polda DIY sejak pagi hari sudah berjaga-jaga mengamankan hari terakhir rekapitulasi suara Pilwali 2017.

Namun, bentrokan bisa dihindarkan setelah koordinator massa dan kepolisian sama-sama bisa menenangkan situasi. Tak ada korban dalam gesekan kali ini, tapi beberapa anggota polisi mendapat perawatan dari tim medis.

•ristuhanafi

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Sekretariat Komisi Pemilihan U	Netral	Biasa	Untuk Diketahui
2. Sekretariat Panwaslu (Bawaslu)			

Yogyakarta, 05 Agustus 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005